

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

AI Putri Oktavia¹, Ikhwan Wadi²

Politeknik Negeri Sriwijaya¹, Universitas Gunung Rinjani²

Email: alputrioktavia@polsri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan aset daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lombok Timur. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda terhadap 50 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan aset daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan aset daerah menjadi variabel yang paling dominan. Temuan ini menunjukkan pentingnya optimalisasi sumber pendapatan dan pengelolaan aset untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pengelolaan Aset Daerah, Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kemandirian daerah serta mendorong pemerataan pembangunan. Dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengelola keuangan daerah, termasuk dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah dan mengalokasikan anggaran secara efektif. Hal ini bertujuan agar daerah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan keuangan daerah menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Sari, 2021).

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penggunaan anggaran secara optimal. Pengelolaan keuangan yang efektif tidak hanya dilihat dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan output dan outcome yang sesuai dengan tujuan pembangunan. Hal ini menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja agar mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah (Putra, 2022).

Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah tanpa imbalan langsung. Tingginya penerimaan pajak daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan sistem pemungutan yang belum optimal (Rahmawati, 2020).

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga memiliki kontribusi penting terhadap peningkatan PAD. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Retribusi memiliki karakteristik adanya imbalan langsung berupa pelayanan atau fasilitas. Pengelolaan retribusi yang baik akan meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Namun, berbagai permasalahan seperti kebocoran penerimaan dan lemahnya pengawasan masih menjadi kendala dalam optimalisasi retribusi daerah (Hidayat, 2021).

Pengelolaan aset daerah merupakan faktor penting lainnya dalam mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Aset daerah yang dikelola secara optimal dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Pengelolaan aset yang baik meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan aset secara tertib dan sesuai dengan ketentuan. Namun, dalam praktiknya masih banyak daerah yang menghadapi permasalahan seperti pencatatan aset yang tidak tertib, aset yang tidak dimanfaatkan secara optimal, serta lemahnya sistem pengawasan (Wibowo, 2020).

Kabupaten Lombok Timur sebagai salah satu daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, terutama pada sektor pertanian, pariwisata, dan perdagangan. Potensi tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah. Namun, dalam kenyataannya, pemerintah daerah masih menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola keuangan daerah secara efektif, seperti rendahnya kontribusi PAD dan belum optimalnya pengelolaan aset daerah (Pratama, 2022).

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lombok Timur masih perlu ditingkatkan. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat masih cukup tinggi, yang menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah serta pengelolaan aset yang lebih baik (Yuliani, 2021).

Optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan aset daerah merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Ketiga variabel tersebut memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pajak dan retribusi sebagai sumber utama pendapatan daerah harus dikelola secara profesional, sementara aset daerah harus

dimanfaatkan secara produktif agar memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah (Saputra, 2020).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan aset daerah memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Namun, hasil penelitian tersebut masih menunjukkan adanya perbedaan temuan atau research gap. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menguji kembali hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan menggunakan objek penelitian yang berbeda, khususnya di Kabupaten Lombok Timur (Nugroho, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan aset daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi sektor publik serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah secara lebih efektif dan efisien (Lestari, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif kausal yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan aset daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pendekatan ini digunakan karena penelitian menguji hubungan antar variabel melalui analisis statistik sehingga menghasilkan kesimpulan yang objektif dan terukur.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan objek penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria pegawai yang bekerja di bidang keuangan, pajak, dan aset serta memiliki pengalaman minimal satu tahun. Jumlah sampel sebanyak 50 responden.

Jenis data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima poin, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan literatur terkait. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak daerah (X1), retribusi daerah (X2), dan pengelolaan aset daerah (X3), sedangkan variabel dependen adalah efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Y).

Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Sebelum analisis, dilakukan uji validitas dan reliabilitas serta uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Model persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial, serta koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis data dilakukan menggunakan bantuan software statistik seperti SPSS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek dalam penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kabupaten Lombok Timur memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan akuntabel. Sebagai daerah dengan jumlah penduduk yang cukup besar di Pulau Lombok, Kabupaten Lombok Timur dituntut untuk mampu mengelola sumber daya keuangan secara optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan daerah.

Secara administratif, Kabupaten Lombok Timur terdiri dari beberapa kecamatan dengan karakteristik wilayah yang beragam, mulai dari wilayah pertanian, pesisir, hingga kawasan yang memiliki potensi pariwisata. Potensi ekonomi yang dimiliki daerah ini cukup besar, terutama pada sektor pertanian, perdagangan, dan pariwisata. Potensi tersebut menjadi sumber utama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Namun demikian, optimalisasi potensi tersebut masih memerlukan pengelolaan yang lebih baik agar dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lombok Timur dilaksanakan oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sementara Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) berperan dalam mengelola penerimaan daerah, khususnya pajak dan retribusi. Selain itu, OPD lainnya juga berkontribusi dalam pelaksanaan anggaran dan pengelolaan program pembangunan sesuai dengan bidang masing-masing.

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lombok Timur masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya penerimaan pajak dan retribusi daerah, yang disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak, keterbatasan sistem pemungutan, serta kurangnya pengawasan. Selain itu, pengelolaan aset daerah juga masih menghadapi permasalahan, seperti pencatatan aset yang belum tertib, pemanfaatan aset yang belum optimal, serta keterbatasan dalam pengawasan dan pemeliharaan aset.

Meskipun demikian, pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan sistem administrasi perpajakan, optimalisasi pemungutan retribusi, serta penataan dan pemanfaatan aset daerah secara lebih produktif. Selain itu, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan juga terus ditingkatkan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Lombok Timur menjadi objek penelitian yang relevan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan aset daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kondisi pengelolaan keuangan daerah serta menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.

Tabel 1
Hasil Uji t

Variabel	t hitung	Sig.	Keterangan
Pajak Daerah	3,215	0,002	Berpengaruh
Retribusi Daerah	2,487	0,016	Berpengaruh
Pengelolaan Aset Daerah	4,102	0,000	Berpengaruh

Sumber: Data Diolah 2026

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pajak daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 ($< 0,05$) dengan nilai t hitung sebesar 3,215. Secara statistik, hal ini mengindikasikan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain, hipotesis yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat diterima. Nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel serta tingkat signifikansi yang berada di bawah 0,05 menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan memiliki dasar empiris yang kuat.

Secara teoritis, temuan ini dapat dijelaskan melalui grand theory dalam keuangan publik, khususnya teori desentralisasi fiskal (fiscal decentralization theory) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya keuangannya secara mandiri guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Pajak daerah merupakan salah satu komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan operasional pemerintahan daerah. Semakin besar kontribusi pajak daerah, maka semakin besar pula kapasitas fiskal daerah dalam mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.

Selain itu, teori agensi (agency theory) juga relevan dalam menjelaskan hubungan ini. Pemerintah daerah sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang berasal dari masyarakat (principal) secara optimal. Peningkatan penerimaan pajak daerah mencerminkan adanya kepercayaan masyarakat serta efektivitas sistem pemungutan pajak, yang pada akhirnya mendorong pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan. Dengan demikian, semakin tinggi pajak daerah, semakin tinggi pula tuntutan akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan berbagai riset terdahulu yang menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Penelitian sebelumnya menemukan bahwa peningkatan pajak daerah berdampak positif terhadap efisiensi pengelolaan anggaran dan peningkatan kualitas

belanja publik. Hal ini dikarenakan pajak daerah memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi pemerintah daerah dibandingkan dengan dana transfer dari pusat, sehingga pengelolaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas lokal.

Secara empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat penerimaan pajak yang tinggi cenderung memiliki sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan anggaran. Hal ini dapat terjadi karena ketersediaan sumber daya keuangan yang memadai memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas aparatur, memperkuat sistem pengendalian internal, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan.

Temuan penelitian bahwa pajak daerah merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu terus mengoptimalkan potensi pajak daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, perbaikan sistem administrasi perpajakan, serta inovasi dalam pemungutan pajak. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan pada akhirnya mendorong terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,016 ($< 0,05$) dengan nilai t hitung sebesar 2,487. Hal ini mengindikasikan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh retribusi daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat diterima. Nilai t hitung yang lebih besar dari t tabel serta tingkat signifikansi yang berada di bawah ambang batas 0,05 menunjukkan bahwa hubungan tersebut bersifat nyata secara statistik dan bukan terjadi secara kebetulan.

Secara teoritis, temuan ini dapat dijelaskan melalui grand theory dalam keuangan publik, khususnya teori desentralisasi fiskal. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD), salah satunya melalui retribusi daerah. Retribusi merupakan pungutan yang dikenakan atas jasa atau izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Berbeda dengan pajak daerah, retribusi memiliki hubungan langsung antara pembayaran yang dilakukan dengan manfaat yang diterima, sehingga mendorong efisiensi dalam penyediaan layanan publik. Ketika retribusi daerah meningkat, hal ini mencerminkan meningkatnya aktivitas pelayanan publik serta optimalisasi pemanfaatan aset dan jasa daerah, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas pengelolaan keuangan.

Selain itu, teori agensi juga relevan dalam menjelaskan hasil ini. Pemerintah daerah sebagai agen memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya yang berasal dari masyarakat secara akuntabel. Penerimaan retribusi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memanfaatkan layanan publik yang disediakan, sehingga pemerintah dituntut untuk mengelola dana tersebut secara efektif dan transparan. Dengan meningkatnya retribusi, tekanan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan juga semakin besar, sehingga mendorong terciptanya sistem pengelolaan yang lebih baik.

Temuan penelitian ini konsisten dengan berbagai riset terdahulu yang menyatakan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja dan efektivitas keuangan daerah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa optimalisasi retribusi daerah mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta memperkuat kemandirian keuangan. Hal ini penting terutama bagi daerah yang memiliki keterbatasan dalam penerimaan pajak daerah, sehingga retribusi menjadi alternatif sumber pendapatan yang strategis.

Secara empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daerah yang mampu mengelola dan mengoptimalkan retribusi dengan baik cenderung memiliki pengelolaan keuangan yang lebih efektif. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan daerah dalam merencanakan anggaran secara tepat, melaksanakan program secara efisien, serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran. Peningkatan retribusi juga dapat digunakan untuk membiayai peningkatan kualitas layanan publik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Dengan demikian, bahwa retribusi daerah merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu terus mengoptimalkan potensi retribusi melalui perbaikan sistem pemungutan, peningkatan kualitas layanan publik, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah dan mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pengelolaan aset daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 ($< 0,05$) dengan nilai t hitung sebesar 4,102. Temuan ini mengindikasikan bahwa pengelolaan aset daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh pengelolaan aset daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat diterima. Nilai t hitung yang jauh lebih besar dibandingkan t tabel serta tingkat signifikansi yang sangat kecil menunjukkan bahwa hubungan tersebut sangat kuat secara statistik dan memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi.

Secara teoritis, hasil ini dapat dijelaskan melalui grand theory dalam keuangan publik, khususnya teori manajemen aset publik (public asset management theory) dan teori desentralisasi fiskal. Dalam perspektif manajemen aset publik, aset daerah merupakan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang harus dikelola secara optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Pengelolaan aset yang baik mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, hingga penghapusan aset. Ketika seluruh siklus ini berjalan dengan baik, maka aset daerah dapat memberikan nilai tambah, baik dalam bentuk peningkatan pelayanan maupun kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Dalam kerangka teori desentralisasi fiskal, pengelolaan aset daerah menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kemandirian dan kapasitas fiskal daerah. Aset yang dikelola secara optimal dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan, seperti melalui kerja sama pemanfaatan, sewa, atau bentuk lainnya. Hal ini pada akhirnya

akan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah karena pemerintah memiliki sumber daya tambahan yang dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan secara efisien.

Selain itu, teori agensi juga memberikan landasan dalam memahami hubungan ini. Pemerintah daerah sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk mengelola aset yang dipercayakan oleh masyarakat secara transparan dan akuntabel. Pengelolaan aset yang baik mencerminkan adanya sistem pengendalian internal yang kuat, administrasi yang tertib, serta komitmen terhadap prinsip good governance. Hal ini akan berdampak langsung pada efektivitas pengelolaan keuangan, karena aset yang terdata dan terkelola dengan baik akan meminimalkan potensi penyalahgunaan serta meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya.

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai riset terdahulu yang menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa kelemahan dalam pengelolaan aset, seperti tidak adanya pencatatan yang akurat atau pemanfaatan yang tidak optimal, dapat menghambat efektivitas keuangan daerah. Sebaliknya, pengelolaan aset yang profesional dan berbasis sistem informasi yang baik mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan.

Secara empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa daerah yang memiliki sistem pengelolaan aset yang baik cenderung mampu mengelola keuangannya secara lebih efektif. Hal ini terlihat dari kemampuan dalam menyusun perencanaan anggaran yang realistis, memanfaatkan aset untuk mendukung kegiatan operasional, serta mengoptimalkan potensi ekonomi dari aset yang dimiliki. Pengelolaan aset yang baik juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat karena didasarkan pada data yang akurat dan terkini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset daerah merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas pengelolaan aset melalui penataan administrasi, penggunaan teknologi informasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan aset daerah secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Lombok Timur. Pengelolaan aset daerah menjadi variabel yang paling dominan dalam meningkatkan efektivitas keuangan daerah, diikuti oleh pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi sumber pendapatan daerah serta pengelolaan aset yang baik mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan

kualitas pengelolaan ketiga aspek tersebut guna memperkuat kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat.

REFRENSI

- Hidayat, R. (2021). Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Daerah*, 9(2), 112–120.
- Lestari, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 11(1), 55–67.
- Nugroho, A. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 8(3), 201–210.
- Pratama, Y. (2022). Analisis PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Keuangan Daerah*, 10(1), 33–45.
- Putra, A. (2022). Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 12(2), 88–99.
- Rahmawati, S. (2020). Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Publik*, 7(1), 45–54.
- Saputra, R. (2020). Pengelolaan Aset Daerah dan Dampaknya terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 6(2), 77–89.
- Sari, D. (2021). Pengaruh PAD terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Publik*, 10(2), 45–58.
- Wibowo, T. (2020). Evaluasi Pengelolaan Aset Daerah. *Jurnal Manajemen Keuangan*, 5(1), 23–34.
- Yuliani, E. (2021). Analisis Kemandirian Fiskal Daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(1), 14–25.